



## **Strategi DPR RI Dalam Meningkatkan Transparansi di Media Sosial: Studi Kasus Youtube TV Parlemen**

**Titi Nurholizah\*, Muhammad Prakoso Aji**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*2110413027@mahasiswa.upnvj.ac.id

### **Abstract**

*This study analyzes the transparency strategy of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) through its YouTube channel, TV Parlemen, as part of the legislature's digital communication. The research is motivated by low public trust in the DPR and the growing demand for open, accessible political information in the digital era. It aims to examine how transparency is implemented via TV Parlemen and to assess the effectiveness of this channel in promoting public access to information. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with officials from the Parliamentary News Bureau, the Head of TVR Parlemen, and political observers, complemented by observation of TV Parlemen content and analysis of supporting documents. The findings show that transparency through YouTube remains largely procedural. Although information is opened via live streaming of plenary and commission meetings, the content is dominated by long formats, technical language, and limited contextual explanation, making it difficult for the general public to understand. Mechanisms of agenda setting and quality control also keep openness within institutional boundaries by filtering certain issues, while the interactive features of social media are underutilized. TV Parlemen tends to operate as a one-way documentation channel, reflected in a very low engagement rate of around 0.01%. The study concludes that the channel functions more as an archive than as a medium of substantive transparency, and recommends more concise, contextual, and interactive content packaging to strengthen public understanding and participation.*

**Keywords:** *Indonesian House of Representatives; Transparency; Social Media; YouTube Parliament TV*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi melalui kanal YouTube TV Parlemen sebagai bagian dari komunikasi digital lembaga legislatif. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan meningkatnya kebutuhan akan akses informasi politik yang terbuka serta mudah dipahami di era digital. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji strategi transparansi DPR melalui YouTube TV Parlemen dan menilai sejauh mana kanal ini efektif mendorong keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian TVR Parlemen, dan pengamat politik, serta observasi konten YouTube TV Parlemen dan analisis dokumen pendukung. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa transparansi DPR melalui YouTube TV Parlemen masih bersifat prosedural. Akses informasi memang dibuka melalui live streaming rapat paripurna dan rapat komisi, namun konten didominasi durasi panjang, bahasa teknis, dan minim penjelasan kontekstual sehingga sulit dipahami masyarakat umum. Mekanisme agenda setting dan quality control juga membatasi keterbukaan karena adanya penyaringan terhadap isu-isu tertentu, sementara karakteristik media sosial belum dimanfaatkan secara optimal. Kanal YouTube TV Parlemen

cenderung menerapkan pola komunikasi satu arah tanpa pengelolaan interaksi, yang tercermin pada engagement rate sangat rendah sekitar 0,01 persen. Disimpulkan bahwa YouTube TV Parlemen lebih berfungsi sebagai media dokumentasi dibandingkan sebagai sarana transparansi. Penelitian ini merekomendasikan pengemasan konten yang lebih ringkas, kontekstual, dan interaktif agar transparansi DPR melalui platform digital dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik secara lebih efektif.

## Kata Kunci: DPR RI; Transparansi; Media Sosial; Youtube TV Parlemen

### Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi yang dilakukan oleh DPR RI melalui media sosial Youtube TV Parlemen. Analisis berfokus terhadap bagaimana informasi yang diberikan dapat berdampak dalam mewujudkan kebutuhan transparansi masyarakat. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dimungkinkan dengan adanya akses informasi, yang juga mendorong peningkatan kualitas layanan informasi (Novandra et al., 2024). Lebih dari pada itu, dengan terciptanya transparansi maka seluruh lapisan masyarakat dapat memastikan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka serta dapat diawasi oleh publik. Dalam hal ini, lembaga legislatif termasuk DPR RI kerap kali menerima kritik dari masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam menjalankan tugasnya terhadap masyarakat. Hal ini yang kerap kali memicu masyarakat untuk memiliki tantangan berlebih dalam mengakses informasi terkait keputusan rapat yang ditetapkan oleh DPR RI, hingga kebijakan yang diputuskan oleh lembaga legislatif tersebut.

Dalam konteks literasi media, hasil survei menunjukkan bahwa 52,4% (1069) responden memiliki tingkat literasi media yang tinggi, sementara 16,4% (334) responden berada pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, 27,5% (561) responden memiliki tingkat literasi media yang rendah, dan hanya 3,7% (76) responden yang berada pada tingkat literasi media yang sangat rendah (aji.or.id, 2024). Hal ini membuktikan bahwa hadirnya media sosial dapat menjadi alat utama dalam konteks strategi bagi lembaga legislatif dalam memberikan informasi yang dapat diserap oleh masyarakat melalui media sosial. Melansir dari (Wearesocial, 2024), data tren pengguna internet dan media sosial di tahun 2024 berjumlah 185,3 juta dari pengguna internet serta 139 juta pengguna media sosial dengan total populasi Indonesia yang berjumlah 278,7 juta (wearesocial.com, 2024), tentunya data ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dari data yang sudah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa setengah dari total populasi masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi - informasi terkini. Saat ini media sosial memegang kendali penuh atas aksesibilitas yang mudah dan praktis untuk dikonsumsi oleh setiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap pada penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian yang secara spesifik menganalisis strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi, khususnya di YouTube TV Parlemen, terutama dalam melihat bagaimana keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan melalui penyediaan akses siaran rapat secara langsung, tetapi juga melalui cara informasi tersebut dikemas, diseleksi, dan disampaikan kepada publik. Transparansi publik akan efektif apabila informasi yang disampaikan oleh lembaga negara tidak hanya dibuka secara formal, tetapi juga disajikan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat luas (Rahmawati, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan media sosial sebagai alat penyebarluasan informasi atau mengukur efektivitasnya dari aspek teknis, seperti jumlah penonton dan tingkat keterlibatan, tanpa mengkaji secara mendalam batas-batas transparansi yang muncul dalam praktik komunikasi lembaga legislatif. Oleh karena

itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada transparansi publik dengan menelaah strategi DPR RI melalui YouTube TV Parlemen, termasuk mekanisme *agenda setting*, pengemasan konten, serta pola komunikasi yang diterapkan, untuk melihat sejauh mana transparansi yang dibangun bersifat substantif atau masih terbatas pada pemenuhan prosedur keterbukaan informasi. Namun, transparansi yang hanya berfokus pada pemenuhan prosedur formal, seperti publikasi agenda atau siaran kegiatan, belum tentu mampu memenuhi kebutuhan publik akan pemahaman yang utuh terhadap proses dan kinerja lembaga negara (Saputra, 2021).

Sejalan dengan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian utama: apakah strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi di YouTube TV Parlemen telah mampu mewujudkan keterbukaan informasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga dapat dipahami dan dimaknai oleh publik?. Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada dua pijakan utama, yaitu: (1) teori transparansi menurut Agus Dwiyanto (2006) yang membagi transparansi ke dalam tiga aspek, yakni keterbukaan proses, kejelasan prosedur, serta kemudahan dalam memperoleh informasi, dan (2) konsep media sosial menurut Rulli Nasrullah (2016) yang memaknai media sosial sebagai “medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan diri, berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain”. Kedua kerangka ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana strategi DPR RI dalam mengelola kanal YouTube TV Parlemen membangun transparansi publik dalam praktiknya.

Dengan demikian, Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana DPR RI menggunakan media sosial khususnya YouTube TV Parlemen sebagai strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik atau transparansi. Pada dasarnya, platform ini dibuat untuk menjadi saluran informasi antara publik dan legislatif, sehingga publik dapat mengetahui fungsi DPR RI dan memberikan komentar dalam bentuk kritik dan rekomendasi. Namun, data interaksi yang minim mengindikasikan bahwa pada kenyataannya, partisipasi publik di kanal YouTube DPR RI masih cukup rendah. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menjadikan kanal resmi YouTube TV Parlemen ini sebagai sumber utama informasi terkait kegiatan DPR RI serta sebagai alat transparansi bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tampaknya lebih mempercayai informasi dari media independen atau pihak ketiga yang dianggap lebih objektif dan kredibel. Dalam praktiknya, transparansi digital kerap dibatasi oleh kepentingan institusional, sehingga informasi yang bersifat sensitif atau berpotensi menimbulkan kritik publik cenderung tidak ditampilkan secara terbuka (Sari & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelusuri lebih dalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh DPR RI melalui kanal digital seperti YouTube benar-benar diimplementasikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan transparansi seperti yang diharapkan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi melalui kanal YouTube TV Parlemen. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan konten YouTube TV Parlemen yakni Biro Pemberitaan Parlemen, serta pengamat politik yang memiliki kompetensi dalam kajian transparansi publik. Data sekunder diperoleh melalui observasi terhadap konten YouTube TV Parlemen dan penelusuran dokumen terkait, seperti laporan kelembagaan dan arsip

publikasi resmi hingga *engagement rate* yang memperlihatkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap konten Youtube TV Parlemen. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan catatan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan praktik transparansi DPR RI dalam pengelolaan kanal YouTube TV Parlemen.

## Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi melalui kanal YouTube TV Parlemen. Pembahasan difokuskan pada bagaimana transparansi publik disajikan dalam praktik komunikasi digital DPR RI, khususnya melalui penyajian konten, mekanisme agenda setting, serta pola komunikasi yang diterapkan dalam pengelolaan kanal YouTube TV Parlemen.

### 1. Strategi Transparansi melalui Agenda Setting dan Batas Transparansi Institusional di YouTube TV Parlemen

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa setiap isu yang dimunculkan di kanal YouTube TV Parlemen tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil proses seleksi yang panjang melalui rapat redaksi harian, rapat mingguan, dan Rapat Dewan Redaksi setiap Senin pagi. Keterbukaan informasi publik tidak hanya soal memberikan akses, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah dipahami dan memberi ruang bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Dwiyanto, 2006) Dalam kasus TV Parlemen, fungsi tersebut dijalankan oleh institusi, bukan oleh mekanisme media independen. Artinya, keterbukaan informasi DPR tetap berada dalam koridor kepentingan lembaga. Berdasarkan wawancara peneliti dengan biro pemberitaan parlemen, strategi Youtube TV Parlemen memiliki pola kerja editorial yang terstruktur.

Setiap unit melakukan rapat redaksi, lalu mengusulkan isu apa saja yang akan dibahas usulan ini dibentuk berdasarkan monitoring isu dan tren media, termasuk analisis Indonesia *Monitoring System* di bagian media sosial. Selain itu, setiap unit juga melakukan rapat redaksi biro rapat ini dipimpin Kepala Biro dan dihadiri seluruh kepala bagian. Setiap unit mempresentasikan evaluasi mingguan, capaian *viewers*, *engagement*, serta analisis isu yang berpotensi berkembang. Dari rapat ini diputuskan agenda setting mingguan untuk seluruh platform media DPR RI. Menurut wawancara bersama pak Maryanto sebagai kepala bagian TVR Parlemen, alur produksi konten meliputi: produser → editor → *Quality Control (QC)* → persetujuan kasubag → publikasi.

*Quality control* sendiri nantinya akan menentukan apakah konten layak tayang berdasarkan dampak, sensitivitas politik, serta kesesuaian dengan citra lembaga. Dalam hal ini narasumber memaparkan bahwasanya “*quality control* bisa menentukan sebuah konten naik atau tidak. Kalau dampaknya negatif, konten bisa ditolak.” hal ini menunjukkan bahwasanya meski DPR membuka akses informasi, framing tetap dilakukan secara institusional untuk menjaga citra lembaga dimana fungsi strategi digunakan untuk memastikan pesan disampaikan secara efektif sesuai tujuan politik lembaga. Pernyataan ini memiliki implikasi penting, dimana proses editing dan quality control menjadi titik di mana transparansi berpotensi dikurangi. Lembaga publik seharusnya tidak hanya membuka informasi tetapi juga memastikan informasi itu tidak diselewengkan oleh proses internal (Dwiyanto, 2006). Namun penelitian menemukan bahwa *quality control* berfungsi sebagai filter politis daripada filter teknis. Konten yang berpotensi menimbulkan kontroversi, misalnya konflik internal komisi, kritik keras

anggota terhadap pemerintah, sering kali tidak ditampilkan kembali dalam bentuk highlight. Selain itu, peneliti menemukan bahwa keterbukaan informasi DPR pada YouTube TV Parlemen sering kali bersifat selektif. Isu-isu yang sensitif, berpotensi menimbulkan polemik, atau belum memiliki sikap resmi dari DPR sering kali tidak ditayangkan secara penuh atau menunggu framing tertentu dari pimpinan. Biro Pemberitaan sendiri mengakui bahwa dalam isu tertentu, "harus ada arahan dulu dari pimpinan komisi atau pimpinan DPR" sebelum konten dipublikasikan. Hal ini menandakan bahwa transparansi yang dilakukan tetap berada dalam relasi kekuasaan internal lembaga, bukan transparansi yang sepenuhnya netral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun YouTube TV Parlemen menjadi terobosan penting dalam membuka akses informasi politik, namun juga mencerminkan batas-batas transparansi yang dibentuk oleh kepentingan institusional. Penyajian konten politik yang terlalu panjang dan teknis di media sosial juga dapat menurunkan minat publik untuk terlibat, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki latar belakang politik atau hukum (Kurniasih, 2020).

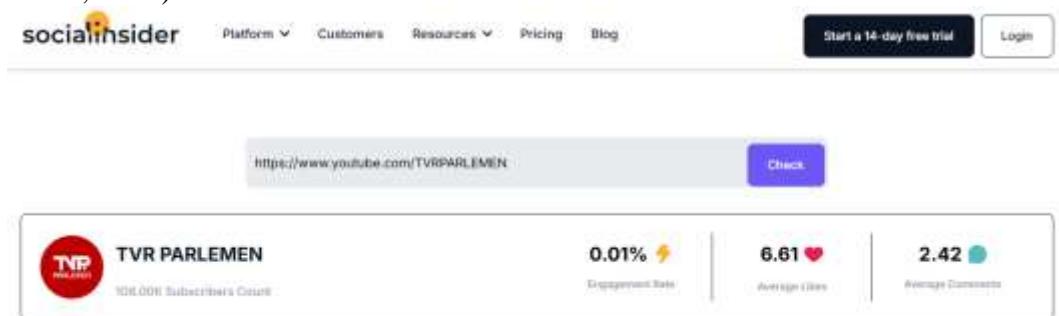
Dalam hal ini, TV Parlemen dilihat hanya menonjolkan aspek tertentu dari kegiatan DPR, contohnya yakni sidang resmi, pernyataan sikap, kritik internal, serta legislasi. namun dalam hal ini YouTube TV Parlemen tidak menekankan aspek lain seperti konflik yang terjadi ketika masyarakat demo kepada DPR RI, kritik yang di protes oleh masyarakat terhadap DPR RI, atau kinerja DPR RI yang lemah. oleh karena itu pengamat politik Efriza mengatakan bahwasanya "yang ditampilkan sering kali adalah sisi-sisi yang aman, publik menunggu hal sensitif, tetapi itu justru tidak di ekspos".

Menurut penelitian (Machmud, Tobirin, & Rokhman, 2024), lembaga pemerintah di Indonesia sering menjalankan "transparansi selektif", yaitu membuka informasi yang aman bagi citra institusi tetapi tidak memperlihatkan konflik atau dinamika internal yang sensitif. Dengan demikian, proses agenda setting dan framing dalam YouTube TV Parlemen memperlihatkan dua sisi, di satu sisi ingin membuka proses legislatif, tetapi di sisi lain tetap menjaga batas agar citra lembaga tidak terganggu. Keterbukaan informasi publik mengharuskan lembaga negara tidak hanya membuka data atau proses, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami dan menilai kinerja lembaga tersebut secara kritis (Dwiyanto, 2006). Transparansi ideal menuntut adanya kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta kemampuan publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dalam hasilnya, penelitian ini menemukan bahwasanya transparansi DPR RI melalui media digital, khususnya YouTube TV Parlemen, masih berada dalam posisi ambigu: di satu sisi memberikan akses yang luas, tetapi di sisi lain tetap menampilkan kecenderungan institutional framing yang menjaga citra lembaga.

Hal ini tentunya memiliki keterkaitan dengan peran media sosial pemerintah sebagai alat komunikasi politik seperti halnya yang dijelaskan oleh Dr.Rulli. "media sosial pemerintah cenderung memiliki orientasi ganda, dimana ingin memberikan akses kepada khalayak, namun disaat yang bersamaan juga mempertahankan kontrol narasi agar opini publik tidak merugikan institusi (2020:26)". Meskipun media sosial dapat menjadi sarana untuk menunjukkan keterbukaan, penyajian informasi yang kaku dan satu arah sering kali membuat publik merasa kurang dilibatkan dalam proses pemerintahan. Akibatnya, transparansi yang ditampilkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepercayaan publik. Media sosial lembaga pemerintah sering kali digunakan sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, sehingga fungsi partisipatif dan dialogis yang seharusnya melekat pada media sosial belum berjalan optimal (Pratama & Lestari, 2020). Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa keterbukaan DPR RI melalui YouTube TV Parlemen belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik terhadap transparansi yang lebih substantif (Rahmanto, 2024).

## 2. Analisis Interaksi Publik Terhadap Youtube TV Parlemen di Media Sosial

Temuan lapangan menunjukkan akun YouTube TVR Parlemen menunjukkan tingkat keterlibatan/ketertarikan yang sangat rendah. Meskipun memiliki lebih dari 108.000 *subscriber*, Saluran Youtube ini hanya memiliki tingkat interaksi atau *engagement* sebesar 0,01%, dengan setiap video yang menerima rata-rata 2,42 komentar dan 6,61 suka. Dalam hal ini, Keberhasilan transparansi melalui media sosial tidak hanya dapat diukur dari jumlah konten yang dipublikasikan, tetapi juga dari sejauh mana media tersebut membuka ruang interaksi, dialog, dan umpan balik dari masyarakat (Lestari & Maulana, 2022).



Gambar 1. Persentase *Engagement Rate* Youtube TV Parlemen

Menurut statistik ini, walaupun saluran Youtube TV Parlemen ini memiliki jumlah audiens yang tetap dan dikelola secara formal, namun dampaknya dalam menarik masyarakat dan membangun kepercayaan kepada masyarakat masih sangat minim. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat memengaruhi efektivitas komunikasi digital, karena masyarakat cenderung skeptis terhadap informasi yang berasal dari kanal resmi lembaga negara (Setiawan, 2021). Hasil ini mendukung anggapan bahwa publik belum cukup menerima saluran-saluran resmi ini sebagai sumber informasi utama mereka, meskipun DPR RI menaruh harapan besar pada kontribusi media digital terutama pada kanal Youtube untuk meningkatkan transparansi. Informasi dari media independen dianggap lebih kredibel dan objektif dibandingkan media resmi pemerintah masih lebih dipercaya publik. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, yang berujung pada rendahnya efektifnya strategi DPR RI dalam membuka ruang transparansi, terutama yang disebarluaskan di Youtube TV Parlemen.

Rendahnya *engagement* juga berkaitan erat dengan citra DPR RI yang sudah terlanjur negatif di mata publik. Dinamika citra DPR RI mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, di periode tahun 2019 - 2024, dimana persentase diujikan kepada 506 responden di 34 provinsi Indonesia. Sampel tersebut ditentukan secara acak yang diambil dalam rentan waktu 4-6 april 2023. Sebanyak 76,2 persen warga menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja DPR 2019–2024 (Sinulingga, 2023). Persentase ketidakpuasan tersebut mencakup beberapa aspek dari aspek transparansi, keterwakilan kepada rakyat, hingga aspek kepuasan lainnya. Dimana hal ini dapat disimpulkan bahwasanya DPR RI belum cukup untuk menunjang kebutuhan dan harapan masyarakat dalam menjalankan fungsi legislatifnya.

Rendahnya tingkat kepercayaan publik selama beberapa tahun kebelakang terhadap DPR RI, menyebabkan publik cenderung skeptis terhadap produk komunikasinya. Publik tidak hanya tidak peduli pada konten DPR karena formatnya tidak menarik, tetapi juga karena mereka sudah terlanjur memiliki persepsi bahwa DPR tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Rendahnya interaksi publik pada akun media sosial pemerintah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti dengan upaya membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat (Hidayat, 2021). Skeptisme ini membuat kanal DPR berada dalam posisi komunikasi yang sulit,

informasi dibuka, tetapi minat publik tetap rendah karena faktor emosional dan politis yang lebih besar. Dalam strategi politik, respon publik merupakan elemen penting terutama dalam media sosial. Hal ini akan mendorong pertumbuhan demokrasi yang berkualitas dan kesadaran independen dalam keterlibatan politik (Meifilina, 2021).

Jika dikaitkan dengan indikator transparansi menurut (Dwiyanto, 2006), khususnya aspek kemudahan memperoleh dan memahami informasi, rendahnya tingkat *engagement* pada kanal YouTube TV Parlemen menunjukkan bahwa keterbukaan akses belum otomatis menghasilkan transparansi yang efektif. Meskipun DPR RI telah menyediakan akses luas melalui siaran langsung dan unggahan video rapat, informasi yang disampaikan belum dikemas secara ramah bagi publik. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi akan gagal menjangkau masyarakat apabila informasi disajikan terlalu teknis dan tidak disertai penjelasan kontekstual yang memudahkan publik memahami substansi kebijakan (Suryadi, 2022). Dengan demikian, keterbukaan yang dilakukan DPR RI masih lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan pemenuhan kebutuhan informasi publik secara substantif.

Dalam perspektif konsep media sosial menurut Dr. Rulli Nasrullah, media sosial seharusnya menjadi ruang interaksi dan partisipasi, bukan sekadar sarana distribusi informasi satu arah. Namun, rendahnya *engagement* rate YouTube TV Parlemen memperlihatkan bahwa fungsi interaksi tersebut belum berjalan. Penelitian tentang media sosial pemerintah di Indonesia menyebutkan bahwa ketika media sosial hanya digunakan sebagai etalase informasi resmi tanpa respons terhadap publik, maka partisipasi masyarakat cenderung rendah dan media sosial gagal membangun kedekatan emosional dengan audiens (Putri & Nugroho, 2023). Kondisi ini menjelaskan mengapa kanal YouTube TV Parlemen belum mampu memicu diskusi publik atau membangun keterlibatan masyarakat secara aktif.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi DPR RI dalam meningkatkan transparansi melalui kanal YouTube TV Parlemen telah membuka akses informasi publik, terutama melalui siaran langsung rapat legislatif yang memungkinkan masyarakat menyaksikan proses pengambilan keputusan secara langsung. Jika dianalisis menggunakan teori transparansi Agus Dwiyanto, aspek keterbukaan proses relatif telah terpenuhi, namun aspek kejelasan prosedur dan kemudahan memperoleh informasi masih terbatas karena adanya mekanisme *agenda setting*, *quality control*, dan *framing* institusional yang membuat informasi tetap berada dalam koridor kepentingan lembaga serta disajikan dalam format yang panjang, teknis, dan minim penjelasan kontekstual. Dari perspektif konsep media sosial menurut Rulli Nasrullah, kanal YouTube TV Parlemen juga belum mencerminkan komunikasi dua arah yang menjadi karakter utama media sosial, karena pola komunikasi yang diterapkan masih bersifat satu arah tanpa pengelolaan interaksi dan dialog dengan audiens. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat memberikan respons, kritik, dan masukan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap kinerja lembaga negara (Utami & Wibowo, 2022). Rendahnya tingkat *engagement* menunjukkan bahwa publik belum terlibat secara aktif, sehingga YouTube TV Parlemen cenderung berfungsi sebagai media dokumentasi kelembagaan dibandingkan sebagai sarana transparansi publik yang substantif dan partisipatif.

## Daftar Pustaka

Aliansi Jurnalis Independen. (2024). *Di Antara Literasi dan Bias Politik*. AJI Indonesia.

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Hasil Survei Internet APJII 2024*. APJII.
- Zakirah, D. M. A. (2020). Pengaruh Hoaks di Media Sosial terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja di Surabaya. *Mediakita*, 4(1), 37–46.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2023). The Information of Government's Social Media and Websites to Citizen Engagement in Indonesia. *MediaTor*, 16(1), 14–26.
- Machmud, A., Tobirin, T., & Rokhman, A. (2024). Selective Transparency in Government Digital Communication. *Journal of Social Sciences*, 7(2).
- Machmud, F. E. A., Tobirin, T., & Rokhman, A. (2024). Analysis of the Role of Social Media in E-Government Implementation: A Meta-Analysis Study. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(4), 1619–1629.
- Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (4th ed.). Prenadamedia Group.
- Novandra, T. Y., Handayani, N., & Azizah, E. N. (2024). Peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam Mendorong Transparansi Legislasi di DPR RI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 18065–18071.
- Putri, T. D., & Radjagukguk, D. L. (2022). Strategi Komunikasi Manajemen Redaksi Televisi Radio (TVR) Parlemen dalam Meningkatkan Minat Penonton di Era Digital. *JSSHA Adpertisi Journal*, 2(1), 16–28.
- Rahmawati, D. (2019). Transparansi Informasi Publik dalam Komunikasi Pemerintahan Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 115–124.
- Pratama, A. R., & Lestari, P. (2020). Media Sosial Pemerintah dan Problem Komunikasi Satu Arah. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 45–56.
- Hidayat, R. (2021). Keterlibatan Publik dalam Media Sosial Pemerintah: Studi Kasus Lembaga Negara di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 133–145.
- Sari, M., & Nugroho, Y. (2022). Transparansi Selektif dalam Komunikasi Digital Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 67–79.
- Kurniasih, N. (2020). Penyajian Konten Politik di Media Sosial dan Minat Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 89–101.
- Setiawan, B. (2021). Kepercayaan Publik dan Komunikasi Lembaga Legislatif di Era Digital. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1), 55–68.
- Utami, S., & Wibowo, A. (2022). Media Sosial sebagai Ruang Komunikasi Dua Arah Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 4(2), 120–132.
- Saputra, A. (2021). Transparansi Prosedural dan Tantangan Transparansi Substantif dalam Pemerintahan Digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 88–99.
- Lestari, D., & Maulana, R. (2022). Media Sosial Pemerintah dan Interaksi Publik dalam Praktik Transparansi Digital. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 101–113.